



Aisyah Nabila<sup>1</sup>, Agustina Dwiyantri<sup>2</sup>, Dzaki Permana<sup>3</sup>, Siti Mariyah<sup>4</sup>

Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah

Palembang<sup>1,2,3,4</sup>

e-mail: [23041070257@radenfatah.ac.id](mailto:23041070257@radenfatah.ac.id)<sup>1</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implementasi pendidikan inklusif dalam kerangka Kurikulum Merdeka serta tantangan implementasi Kurikulum 2025, menggunakan metode kualitatif deskriptif berbasis studi literatur. Temuan utama mengidentifikasi ketidakpastian sistem Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) sebagai kendala serius bagi Kurikulum 2025, mencakup masalah validitas, input, dan pembaruan data yang menghambat akuntabilitas serta pengambilan keputusan berbasis data, termasuk seleksi perguruan tinggi. Implikasinya, tujuan Kurikulum 2025 untuk mewujudkan pembelajaran yang fleksibel, terdiferensiasi, dan inklusif terancam gagal tercapai secara optimal tanpa dukungan infrastruktur data yang kuat dan terpercaya. Disimpulkan bahwa reformasi data pendidikan menjadi urgensi krusial. Rekomendasi ditekankan pada penguatan sistem PDSS melalui teknologi terintegrasi, pelatihan operator, pemantauan data secara berkala, serta penyelarasan kebijakan data dengan kebijakan kurikulum untuk menjamin keberhasilan reformasi pendidikan yang diusung.

**Kata Kunci:** *PDSS, Kurikulum 2025, Kebijakan Pendidikan*

### ABSTRACT

This study examines the implementation of inclusive education within the Merdeka Curriculum framework and the challenges of implementing the 2025 Curriculum, using a descriptive qualitative method based on literature studies. The main findings identify the uncertainty of the School and Student Database (PDSS) system as a serious obstacle to the 2025 Curriculum, including issues of validity, input, and data updates that hinder accountability and data-based decision making, including university selection. The implication is that the goal of the 2025 Curriculum to realize flexible, differentiated, and inclusive learning is threatened to fail to be achieved optimally without the support of strong and reliable data infrastructure. It is concluded that education data reform is a crucial urgency. Recommendations are emphasized on strengthening the PDSS system through integrated technology, operator training, periodic data monitoring, and aligning data policies with curriculum policies to ensure the success of the proposed education reform.

**Keywords:** *PDSS, 2025 Curriculum, Education Policy*

### PENDAHULUAN

Pendidikan di Indonesia terus mengalami dinamika seiring dengan perubahan kebijakan nasional yang mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Salah satu aspek penting dalam sistem pendidikan adalah keberadaan Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) yang digunakan sebagai sumber utama dalam seleksi nasional masuk perguruan tinggi. Namun, dalam implementasinya, banyak sekolah merasa kebingungan dalam pengisian data PDSS, terutama ketika terjadi perubahan kurikulum seperti Kurikulum 2025. Hal ini diperparah oleh kurangnya pelatihan teknis kepada operator sekolah dan guru wali kelas, sebuah faktor yang seringkali menghambat adopsi teknologi dan sistem baru secara efektif di lingkungan sekolah (Hamid et al., 2020). Padahal, keakuratan data dalam PDSS sangat menentukan peluang siswa dalam mengikuti seleksi jalur prestasi. Ketidakpastian yang timbul dari sistem PDSS ini menuntut adanya perhatian serius dari para pengambil kebijakan.

Kurikulum 2025 dirancang sebagai respons terhadap kebutuhan pendidikan masa depan yang berfokus pada pembentukan karakter, kompetensi abad ke-21, serta penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan belajar. Sayangnya, pelaksanaan kurikulum ini di berbagai sekolah belum sepenuhnya merata karena terkendala oleh ketidaksiapan data, termasuk ketidakpastian dalam pengisian PDSS. Ketidakmerataan tersebut dipengaruhi oleh perbedaan kemampuan sumber daya manusia, infrastruktur digital, dan pemahaman kurikulum, yang mencerminkan adanya kesenjangan digital yang masih signifikan dalam lanskap pendidikan Indonesia (Purwanto et al., 2021). Beberapa daerah tertinggal bahkan belum memiliki akses stabil ke sistem Dapodik yang terintegrasi dengan PDSS. Hal ini menghambat guru dalam menyinkronkan hasil pembelajaran dengan data yang seharusnya tercermin dalam PDSS. Situasi ini membuat efektivitas implementasi Kurikulum 2025 berada dalam ancaman jika tidak segera diatasi.

PDSS sejatinya berperan penting dalam menjembatani antara sekolah dan perguruan tinggi dalam sistem seleksi nasional berbasis prestasi. Ketidakpastian pada sistem ini tidak hanya berdampak pada validitas data siswa, tetapi juga menimbulkan beban administratif tambahan bagi sekolah dan guru, yang dapat mengganggu fokus pada tugas pengajaran inti (Wiyono & Hisyam, 2022). Beban tersebut sering kali dialihkan pada guru bimbingan konseling atau wali kelas tanpa adanya insentif maupun pelatihan yang memadai. Ketidaksesuaian antara data nilai, kompetensi, dan catatan asesmen menjadi salah satu kendala yang memengaruhi kredibilitas PDSS. Oleh karena itu, kesalahan input data akan berakibat fatal bagi siswa yang seharusnya berhak memperoleh jalur prestasi. PDSS harus direformasi agar selaras dengan perubahan kurikulum yang lebih berbasis karakter dan kompetensi. Dalam konteks PDSS, penguatan sistem pendataan harus menjadi prioritas agar kurikulum baru dapat berjalan secara optimal dan tepat sasaran. Ia juga menekankan pentingnya peran dinas pendidikan daerah dalam menjembatani sosialisasi kurikulum dan sistem asesmen digital. Jika hal ini diabaikan, maka gap antara regulasi dan praktik akan terus melebar.

Sebuah studi dari Lestari (2022) mengungkapkan bahwa hanya 42% guru di tingkat menengah atas yang memahami mekanisme pengisian PDSS dengan benar, terutama pada aspek integrasi data dengan hasil asesmen kurikulum baru. Hasil ini menunjukkan adanya kesenjangan informasi yang cukup besar di kalangan pendidik, terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pelatihan berbasis praktik langsung yang dapat meningkatkan keahlian teknis guru. Selain itu, modul pelatihan yang diberikan belum memperhatikan konteks lokal dan keterbatasan fasilitas sekolah. Jika kesenjangan ini tidak segera ditangani, maka pelaksanaan PDSS akan semakin tertinggal dari kebutuhan kurikulum. Oleh karena itu, pelatihan berkelanjutan berbasis digital perlu menjadi kebijakan prioritas nasional, sejalan dengan pentingnya pengembangan profesionalisme guru secara terus-menerus di era digital (Suryani, 2018).

Dalam kurikulum 2025, siswa diarahkan untuk memiliki profil pelajar Pancasila yang utuh melalui pembelajaran yang kontekstual. Namun, jika sistem seperti PDSS tidak akurat dalam mencerminkan kemajuan siswa, maka hasil evaluasi terhadap efektivitas kurikulum pun menjadi bias. Ketidaksesuaian antara nilai rapor kuantitatif dan asesmen kualitatif yang dikembangkan dalam kurikulum baru menjadi masalah utama, sebuah tantangan yang sering dihadapi dalam upaya mengukur kompetensi holistik (Retnawati et al., 2018). Sebagian besar sekolah masih menggunakan format pelaporan konvensional yang tidak mendukung deskripsi kompetensi secara naratif. Ini membuat data dalam PDSS kurang menggambarkan potensi siswa secara menyeluruh. Sistem data pendidikan harus mampu mengikuti prinsip kurikulum yang humanis dan transformatif.

Abdurahmansyah (2022) menyebutkan bahwa transformasi pendidikan tidak cukup dilakukan melalui perubahan kurikulum semata, melainkan harus dibarengi dengan



penyesuaian sistem teknologi dan asesmen yang terintegrasi. Ia juga mengingatkan pentingnya sistem evaluasi yang partisipatif, melibatkan guru sebagai pengguna data, bukan sekadar pelaksana. Pentingnya keterlibatan aktif guru dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi pendidikan juga ditekankan dalam literatur lain untuk memastikan relevansi dan keberlanjutan inovasi (Setiawan & Sulistiyo, 2021). Saat ini, sebagian besar guru hanya menjadi inputer data tanpa memahami bagaimana data tersebut digunakan oleh sistem seleksi nasional. Akibatnya, banyak terjadi kesalahan teknis dan ketidaksesuaian antara data yang dimasukkan dengan realitas akademik siswa. Transformasi digital harus menempatkan guru sebagai subjek yang dilibatkan dalam desain sistem data. Hal ini menjadi dasar bagi keberhasilan kurikulum 2025 yang menekankan pendidikan berbasis konteks.

Selain persoalan teknis, ketidakpastian PDSS juga menyentuh aspek kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan nasional. Ketika data siswa tidak sinkron antara sekolah dan sistem pusat, maka potensi kecurangan atau manipulasi menjadi lebih besar, yang dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap integritas institusi pendidikan (Wijaya et al., 2019). Beberapa sekolah melaporkan adanya tekanan dari pihak tertentu untuk memanipulasi data demi kelulusan atau seleksi prestasi. Hal ini sangat merugikan siswa yang benar-benar berprestasi dan mengancam integritas sistem pendidikan secara keseluruhan. Jika tidak segera dibenahi, sistem seperti PDSS akan kehilangan kredibilitasnya sebagai tolok ukur seleksi nasional. Oleh karena itu, transparansi dan pengawasan eksternal sangat diperlukan.

Studi dari Prasetya (2023) menunjukkan bahwa ketidakakuratan PDSS di beberapa provinsi menghambat siswa-siswa berprestasi untuk memperoleh haknya dalam seleksi nasional. Ketimpangan data yang terjadi juga disebabkan oleh belum meratanya infrastruktur dan akses internet yang mendukung penginputan data secara real time, sebuah cerminan dari kesenjangan akses teknologi yang masih menjadi isu di banyak wilayah (Arifa, 2020). Guru sering kali harus menunggu koneksi jaringan atau datang ke kantor dinas untuk melakukan sinkronisasi. Proses yang rumit ini menyita waktu dan tenaga, sehingga memengaruhi fokus guru terhadap proses pembelajaran. Oleh karena itu, perlu adanya sistem back-up lokal yang memungkinkan sinkronisasi PDSS dilakukan secara fleksibel dan aman. Dengan cara ini, integritas dan efektivitas kurikulum 2025 dapat terjaga di tengah keterbatasan infrastruktur.

Ketidakpastian terhadap sistem PDSS juga berkaitan erat dengan perubahan paradigma kurikulum yang direncanakan pada tahun 2025. Kurikulum baru ini digadang-gadang membawa pembaruan dalam sistem pendidikan Indonesia, namun belum memiliki landasan kuat yang sinkron dengan sistem seleksi seperti PDSS. Inkonsistensi antara pelaksanaan seleksi dan pengembangan kurikulum akan berujung pada kebingungan di kalangan satuan pendidikan dan peserta didik, sebuah tantangan umum dalam reformasi pendidikan skala besar yang memerlukan koherensi sistemik (Rahmawati & Kwen, 2015). Para guru menjadi pihak yang paling terdampak karena harus menyesuaikan metode pembelajaran dengan kurikulum yang belum sepenuhnya matang. Ketidaksiapan ini berdampak terhadap kualitas proses belajar mengajar secara menyeluruh. Dalam hal ini, pendidikan inklusif pun menjadi rentan terabaikan karena fokus utama diarahkan pada penyesuaian sistem evaluasi.

Ketidaksesuaian antara waktu peluncuran kurikulum dan kesiapan infrastruktur seleksi nasional seperti PDSS menambah beban administratif pada pihak sekolah. Banyak sekolah yang belum mendapatkan pelatihan mengenai sistem terbaru, tetapi harus tetap mengikuti aturan yang berubah-ubah. Keadaan ini membuat guru berada dalam posisi serba salah, antara menjalankan perintah atau menyesuaikan dengan kondisi riil kelas, yang berpotensi menurunkan moral dan efektivitas guru (Fitria et al., 2022). Jika hal ini dibiarkan terus berlangsung, maka kualitas pendidikan akan menurun secara sistemik. Pemerintah perlu menyusun kebijakan transisi yang jelas dan terstruktur agar tidak menimbulkan kekacauan lebih lanjut. Tidak hanya guru, peserta didik pun ikut terdampak oleh ketidakpastian ini. Mereka



menjadi bingung dalam menentukan pilihan studi, strategi belajar, bahkan dalam memahami parameter evaluasi akademik. Padahal, proses belajar memerlukan ketenangan dan arah yang jelas. Ketidakpastian akan membuat peserta didik kehilangan motivasi dan rasa percaya diri. Efek jangka panjangnya bisa berupa meningkatnya angka putus sekolah dan menurunnya prestasi akademik.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode utama studi pustaka (library research) untuk memahami secara mendalam fenomena pendidikan inklusif dalam konteks Kurikulum Merdeka. Pengumpulan data difokuskan pada sumber literatur relevan dan dokumen resmi pemerintah, termasuk kebijakan Kemendikbudristek (khususnya Permendikbudristek No. 5 Tahun 2022), artikel akademik dari database jurnal nasional dan internasional bereputasi (dengan prioritas publikasi setelah tahun 2021), kajian pakar, studi kasus implementasi, serta laporan sekunder dari lembaga non-pemerintah terkait pendidikan inklusif. Pendekatan ini dipilih untuk fleksibilitasnya dalam menginterpretasi dinamika kebijakan, implementasi, dan persepsi pemangku kepentingan, dengan tujuan memahami keterkaitan antar aspek tersebut dalam praktik pendidikan terkini di Indonesia.

Proses analisis data menggunakan teknik analisis isi (content analysis) secara tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema kunci seperti strategi pengajaran, pendekatan diferensiasi, dan peran guru dari literatur yang dikaji. Validitas temuan diperkuat melalui triangulasi sumber data (dokumen, artikel, riset lain), seleksi ketat literatur dari sumber bereputasi, dan penerapan *critical review* untuk menilai relevansi serta validitas argumen penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian ini menggunakan penalaran deduktif untuk menganalisis kesenjangan atau kesesuaian antara prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka yang tertuang dalam kebijakan dengan praktik pendidikan inklusif yang tergambar dalam literatur.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kurikulum Merdeka Sebagai Pondasi Pendidikan Inklusif di Indonesia**

Implementasi Kurikulum Merdeka di Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam mendorong pendidikan yang lebih inklusif. Kurikulum ini mengedepankan prinsip diferensiasi dan pembelajaran yang berpusat pada siswa, memungkinkan peserta didik dari berbagai latar belakang, termasuk penyandang disabilitas, memperoleh akses yang adil terhadap pendidikan. Dengan memberikan keleluasaan kepada guru untuk menyesuaikan metode pembelajaran sesuai kebutuhan individu siswa, Kurikulum Merdeka berkontribusi dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih setara dan manusiawi. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya karakter, kompetensi, dan kemandirian peserta didik, yang selaras dengan visi pendidikan nasional yang transformatif. Penelitian Ramadhani (2023) menegaskan bahwa integrasi sains dan teknologi dalam Kurikulum Merdeka sangat penting untuk mendukung pendidikan inklusif berbasis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030. Pemanfaatan teknologi pembelajaran yang tepat guna, seperti aplikasi pembelajaran berbasis AI dan media interaktif, memperkuat aksesibilitas materi bagi siswa dengan kebutuhan khusus. Keterlibatan guru dalam pelatihan dan penguasaan teknologi menjadi faktor pendukung utama keberhasilan integrasi tersebut, yang pada akhirnya mendorong terciptanya pembelajaran yang setara dan partisipatif.

Astuti dan Putri (2024) menemukan bahwa implementasi pendidikan inklusif di bawah payung Kurikulum Merdeka masih menghadapi hambatan sosial seperti stigma dan diskriminasi. Oleh karena itu, strategi pendidikan perlu melibatkan pembentukan sistem layanan inklusif yang adaptif, serta peran orang tua sebagai mitra dalam mendukung tumbuh kembang anak berkebutuhan khusus. Nilai-nilai Islam seperti keadilan, kasih sayang, dan





solidaritas sosial dapat menjadi landasan normatif dalam membangun paradigma pendidikan yang lebih inklusif dan empatik di sekolah. Dalam konteks pelaksanaan di lapangan, guru menjadi aktor sentral dalam mengadaptasi isi Kurikulum Merdeka bagi siswa berkebutuhan khusus. Kompetensi pedagogik guru harus terus dikembangkan agar mampu menyusun strategi pembelajaran yang responsif dan adaptif. Selain itu, dukungan dari pihak sekolah, komunitas, dan stakeholder lain seperti Dinas Pendidikan sangat dibutuhkan untuk memperkuat sistem inklusi secara struktural dan kultural. Pendekatan lintas sektor yang menyatukan peran semua pemangku kepentingan merupakan kunci keberhasilan program ini.

Teknologi pendidikan, khususnya perangkat *bantu (assistive technology)*, terbukti meningkatkan keterlibatan dan kualitas pembelajaran siswa disabilitas. Aplikasi pembaca teks untuk tuna netra, subtitle otomatis untuk tuna rungu, serta platform e-learning adaptif telah membuka ruang partisipasi yang lebih luas. Namun, disparitas infrastruktur dan rendahnya pelatihan guru dalam penggunaan teknologi masih menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah perlu diarahkan untuk memperkuat digitalisasi pendidikan yang inklusif.<sup>5</sup> Kurikulum Merdeka juga memberikan keleluasaan bagi satuan pendidikan untuk menyusun kurikulum operasional sesuai dengan karakteristik lokal, termasuk kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Desentralisasi kurikulum ini membuka peluang bagi sekolah-sekolah untuk berinovasi dalam mendesain pendekatan belajar yang sesuai konteks budaya, geografis, dan sosial siswa. Meski demikian, sekolah memerlukan kapasitas manajerial dan sumber daya yang memadai agar kebebasan ini tidak menjadi beban tambahan, melainkan menjadi kekuatan dalam mendorong pendidikan yang setara.

Evaluasi awal pelaksanaan Kurikulum Merdeka menunjukkan adanya peningkatan partisipasi siswa berkebutuhan khusus dalam kegiatan akademik maupun non-akademik. Banyak sekolah melaporkan peningkatan dalam kehadiran, interaksi sosial, serta hasil belajar siswa disabilitas setelah penerapan pendekatan diferensiatif dan pembelajaran berbasis proyek. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran yang bersifat personal dapat memberikan dampak positif terhadap motivasi dan kepercayaan diri siswa dalam proses belajar. Partisipasi aktif guru dalam komunitas belajar juga menjadi elemen penting dalam keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka yang inklusif. Melalui forum diskusi dan pelatihan bersama, guru dapat saling bertukar pengalaman dan strategi pembelajaran adaptif. Komunitas ini menjadi wadah pengembangan profesional yang berkelanjutan dan memperkuat kapasitas guru dalam merancang kegiatan belajar yang responsif terhadap kebutuhan semua siswa, termasuk mereka yang memiliki hambatan fisik, intelektual, atau sosial. Pendekatan kolaboratif semacam ini berkontribusi pada peningkatan kualitas pembelajaran yang lebih adil dan menyeluruh.

Keterlibatan orang tua dan keluarga juga menjadi faktor kunci dalam mendukung keberhasilan pendidikan inklusif berbasis Kurikulum Merdeka. Ketika sekolah menjalin komunikasi yang efektif dengan orang tua, proses pembelajaran menjadi lebih terarah dan relevan dengan kondisi peserta didik. Kolaborasi ini memperkuat jejaring dukungan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, baik di lingkungan sekolah maupun di rumah. Peran aktif keluarga dapat membantu mengidentifikasi potensi dan hambatan anak secara lebih dini, sehingga strategi pembelajaran yang diterapkan di sekolah dapat lebih tepat sasaran. Penerapan asesmen diagnostik sebagai bagian dari Kurikulum Merdeka juga memberikan kontribusi penting dalam mendukung pendidikan inklusif. Dengan mengidentifikasi kemampuan awal, minat, dan kebutuhan belajar masing-masing siswa, guru dapat menyusun rencana pembelajaran yang sesuai dan bermakna. Asesmen ini juga membantu dalam memantau perkembangan siswa secara holistik, termasuk aspek sosial-emosional yang sering kali terabaikan dalam pendekatan konvensional. Implementasi asesmen formatif ini menjadi langkah strategis dalam memastikan bahwa tidak ada siswa yang tertinggal dalam proses pembelajaran.



Selain itu, pendekatan pembelajaran berbasis proyek (*project-based learning*) yang diusung dalam Kurikulum Merdeka mampu meningkatkan keterlibatan siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Melalui kegiatan yang kontekstual dan kolaboratif, siswa dilatih untuk mengembangkan keterampilan komunikasi, pemecahan masalah, dan kerja sama tim. Ini membuka ruang bagi siswa dengan berbagai latar belakang untuk saling belajar dan menghargai perbedaan. Strategi ini tidak hanya meningkatkan hasil belajar akademik, tetapi juga memperkuat pembentukan karakter inklusif di kalangan peserta didik.

## **2. Strategi Penguatan Pendidikan Inklusif melalui Kurikulum Merdeka**

Kurikulum Merdeka secara eksplisit mendorong penerapan prinsip *Universal Design for Learning* (UDL), sebuah kerangka kerja yang bertujuan menciptakan lingkungan pembelajaran yang aksesibel bagi semua peserta didik sejak awal perancangan. Prinsip UDL mengedepankan penyediaan berbagai cara dalam penyajian materi (*multiple means of representation*), beragam opsi untuk keterlibatan siswa (*multiple means of engagement*), serta berbagai bentuk ekspresi pemahaman siswa (*multiple means of action and expression*). Kerangka kerja ini sangat relevan untuk mewujudkan pendidikan inklusif karena secara proaktif mengurangi hambatan belajar dan menyediakan fleksibilitas yang dibutuhkan oleh siswa dengan beragam latar belakang, kemampuan, gaya belajar, termasuk siswa dengan disabilitas dan kebutuhan belajar lainnya, sehingga memungkinkan partisipasi yang lebih penuh dari semua siswa dalam proses pembelajaran (Katz, 2013). Dengan demikian, penerapan UDL dalam Kurikulum Merdeka berpotensi membuat proses pembelajaran lebih adaptif dan partisipatif bagi seluruh siswa di kelas reguler.

Selaras dengan pendekatan UDL, Kurikulum Merdeka juga memberikan penekanan kuat pada internalisasi nilai-nilai universal seperti toleransi, kasih sayang (empati), dan kepedulian sosial, yang seringkali diintegrasikan melalui berbagai mata pelajaran dan penguatan Profil Pelajar Pancasila. Penanaman nilai-nilai ini dianggap fundamental dalam membentuk karakter siswa dan secara langsung mendukung terciptanya budaya sekolah yang inklusif, yaitu lingkungan yang ramah, aman, dan terbuka terhadap segala bentuk keberagaman, termasuk keberadaan siswa berkebutuhan khusus (Hidayat & Sari, 2022). Penguatan pendidikan karakter yang berfokus pada nilai-nilai etis ini bertujuan membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga mampu menghargai perbedaan, berinteraksi secara positif, dan membangun relasi sosial yang sehat dengan sesama. Pendekatan ini menggarisbawahi bahwa implementasi inklusivitas dalam kerangka Kurikulum Merdeka bukanlah sekadar penyesuaian teknis kurikulum dan pedagogi, melainkan sebuah komitmen etis dan kultural untuk menghargai martabat dan potensi setiap individu dalam komunitas sekolah.

Namun demikian, tantangan dalam implementasi pendidikan inklusif tidak dapat diabaikan. Salah satunya adalah keterbatasan jumlah guru pendamping khusus (GPK) di sekolah-sekolah reguler. Kekurangan ini berdampak pada rendahnya dukungan individual kepada siswa disabilitas, yang berujung pada kesenjangan pencapaian akademik dan partisipasi sosial. Untuk itu, pemerintah perlu memperkuat regulasi dan alokasi sumber daya untuk memperbanyak tenaga pendidik khusus yang kompeten dan terdistribusi secara merata.

Implementasi Kurikulum Merdeka yang inklusif menuntut perhatian serius tidak hanya pada Guru Pendamping Khusus (GPK), tetapi juga pada ketersediaan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas, sebuah aspek yang krusial namun seringkali terabaikan. Banyak sekolah, khususnya di daerah terpencil, masih kekurangan fasilitas esensial seperti jalur landai (ramps), toilet aksesibel, serta alat bantu belajar visual dan auditori yang memadai, yang menjadi hambatan fisik nyata bagi partisipasi penuh siswa berkebutuhan khusus (Efendi et al., 2018). Upaya perbaikan infrastruktur ini harus menjadi prioritas agar semua siswa dapat mengakses lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Sejalan dengan penyesuaian fisik, Kurikulum



Merdeka memperkenalkan *differentiated instruction* (pembelajaran berdiferensiasi), yang memberdayakan guru untuk mengadaptasi metode pengajaran, konten materi, proses belajar, dan bentuk penilaian sesuai dengan keragaman karakteristik siswa, termasuk minat, gaya belajar, dan tingkat kesiapan mereka (Suprayogi et al., 2022). Pendekatan ini memungkinkan siswa berkebutuhan khusus tidak dipaksa mengikuti ritme seragam, melainkan mendapatkan dukungan yang tepat untuk berkembang optimal sesuai potensi uniknya.

Penguatan semangat inklusivitas dalam Kurikulum Merdeka juga tercermin dalam penekanan pada Profil Pelajar Pancasila, yang menanamkan nilai-nilai fundamental seperti penghargaan terhadap kebinekaan global, kemampuan gotong royong, dan pengembangan kemandirian. Nilai-nilai ini berfungsi sebagai kompas moral dalam membentuk karakter siswa yang toleran, inklusif, dan mampu berinteraksi secara positif dalam lingkungan yang beragam, yang implementasinya diwujudkan melalui berbagai proyek dan kegiatan pembelajaran di sekolah (Hidayat & Sari, 2022). Di luar aspek kurikulum dan strategi pembelajaran formal, budaya sekolah memegang peranan sentral; sekolah yang secara aktif membangun budaya positif yang mengedepankan penerimaan terhadap perbedaan, empati, dan dukungan sosial terbukti mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan nyaman bagi siswa berkebutuhan khusus (Mulia et al., 2023). Pembiasaan nilai-nilai inklusif melalui program rutin sekolah menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pendidikan yang benar-benar merata dan berkeadilan bagi semua peserta didik.

Penelitian Mutmainnah (2023) menunjukkan bahwa keterlibatan siswa dalam proses pengambilan keputusan sekolah, seperti dalam OSIS atau kegiatan ekstrakurikuler, memberikan dampak positif terhadap inklusivitas. Ketika siswa dengan kebutuhan khusus diberi kesempatan berpartisipasi aktif dalam kegiatan sekolah, rasa percaya diri mereka meningkat, dan mereka merasa dihargai sebagai bagian dari komunitas. Ini mencerminkan bahwa pendidikan inklusif tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi juga dalam ekosistem sosial sekolah secara keseluruhan.

Adopsi Kurikulum Merdeka di sekolah inklusif juga mendorong praktik *co-teaching* antara guru kelas reguler dan guru pendamping khusus. Kolaborasi ini memperkaya pendekatan pembelajaran dengan memadukan keahlian pedagogis dan spesialisasi kebutuhan khusus. *Co-teaching* membantu siswa berkebutuhan khusus mendapatkan intervensi yang sesuai tanpa harus dipisahkan dari lingkungan kelas reguler. Hal ini mencerminkan prinsip dasar pendidikan inklusif, yaitu integrasi penuh dalam lingkungan belajar yang sama. Pentingnya supervisi akademik dalam memastikan kualitas implementasi Kurikulum Merdeka juga tidak dapat diabaikan. Kepala sekolah dan pengawas perlu secara aktif memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran inklusif, serta memberikan umpan balik konstruktif kepada guru. Dengan supervisi yang baik, kendala-kendala dalam implementasi dapat diidentifikasi sejak dini dan ditangani secara sistematis. Praktik ini juga berkontribusi dalam peningkatan mutu sekolah sebagai institusi yang adaptif dan responsif. Kurikulum Merdeka memberikan ruang lebih besar bagi integrasi kearifan lokal dalam proses belajar mengajar. Dalam konteks pendidikan inklusif, hal ini dapat dimanfaatkan untuk memperkuat identitas dan rasa percaya diri siswa berkebutuhan khusus melalui pendekatan yang relevan dengan lingkungan sosial-budaya mereka. Penggunaan bahasa daerah, cerita rakyat, atau praktik tradisional dalam pembelajaran dapat menjadi medium yang inklusif dan menyenangkan bagi siswa.

Media pembelajaran yang variatif juga menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan Kurikulum Merdeka dalam mendukung inklusivitas. Penggunaan video interaktif, alat peraga visual, dan simulasi digital memungkinkan siswa dengan berbagai kebutuhan untuk memahami materi secara lebih efektif. Inovasi media ini sangat penting untuk menjangkau siswa dengan hambatan visual, auditori, atau kognitif. Namun, perlu adanya pelatihan intensif bagi guru agar dapat menggunakan media ini secara optimal dan kontekstual.

Kerja sama antara sekolah dengan lembaga non-pemerintah dan organisasi sosial juga mendukung praktik pendidikan inklusif. Banyak LSM yang menyediakan layanan pendampingan, terapi, atau pelatihan keterampilan bagi siswa disabilitas dan keluarganya. Kemitraan ini memperluas jaringan dukungan yang dibutuhkan oleh sekolah dalam menjalankan Kurikulum Merdeka secara inklusif. Kolaborasi semacam ini menunjukkan bahwa pendidikan inklusif merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan lintas sektor.<sup>24</sup> Terakhir, pengembangan modul ajar yang inklusif perlu menjadi perhatian serius dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Modul yang tersedia saat ini belum sepenuhnya memperhatikan kebutuhan siswa dengan disabilitas, baik dari segi bahasa, tampilan, maupun konten. Diperlukan upaya kolaboratif antara Kemdikbud, akademisi, dan praktisi pendidikan untuk menghasilkan modul ajar yang universal dan ramah disabilitas. Dengan demikian, kesetaraan akses terhadap bahan ajar menjadi lebih terjamin, dan pendidikan inklusif dapat berjalan secara optimal.

### **KESIMPULAN**

Ketidakpastian sistem Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) menghadirkan tantangan signifikan bagi implementasi Kurikulum 2025. Keraguan mengenai mekanisme input, validitas, dan pembaruan data menyebabkan kebingungan di kalangan sekolah, guru, dan siswa. Hal ini berdampak negatif pada akuntabilitas proses pendidikan dan kualitas pengambilan keputusan, terutama untuk seleksi perguruan tinggi dan perencanaan pembelajaran berbasis data. Kurikulum 2025, yang berfokus pada fleksibilitas dan diferensiasi, membutuhkan sistem data yang kuat dan terpercaya agar dapat berjalan optimal. Tanpa sinkronisasi antara kebijakan kurikulum dan infrastruktur pendukung seperti PDSS, tujuan peningkatan kualitas pendidikan yang adaptif dan inklusif sulit tercapai. Oleh karena itu, penguatan PDSS melalui teknologi terintegrasi, pelatihan operator, dan pemantauan data secara berkala menjadi sangat penting. Selain itu, memastikan keselarasan antara kebijakan kurikulum dan kebijakan data adalah kunci. Langkah-langkah ini mendesak dilakukan untuk menjamin keberhasilan reformasi pendidikan yang diusung oleh Kurikulum 2025, menjadikan reformasi data sebagai prioritas utama.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurahmansyah. (2022). Pendidikan Islam inklusif: Nilai-nilai universal dalam kurikulum. *Jurnal Studi Keislaman, UIN Raden Fatah Palembang*, 5(1), 39–48.
- Arifa, F. N. (2020). Tantangan pelaksanaan pembelajaran daring guru sekolah dasar di masa pandemi COVID-19. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 11(1), 59–70. <https://doi.org/10.21009/JPD.011.06>
- Astuti, D., & Putri, N. (2024). Nilai-nilai Islam dan pendidikan inklusif dalam perspektif kebijakan sekolah. *Jurnal Pendidikan Kebutuhan Khusus*, 9(1), 34–45.
- Dian, P. et al. (2023). *Pra-implementasi Kurikulum Merdeka di madrasah: Perencanaan dan kesiapan sumber daya*. UPI Press.
- Efendi, M. et al. (2018). Aksesibilitas fisik sekolah penyelenggara pendidikan inklusif jenjang sekolah dasar. *Jurnal Ortopedagogia*, 4(2), 86–91. <https://doi.org/10.17977/um031v4i22018p086>
- Fitria, H. et al. (2022). Dampak perubahan kebijakan pendidikan terhadap kinerja guru. *Jurnal Iqra' : Kajian Ilmu Pendidikan*, 7(2), 198–209. <https://doi.org/10.25217/ji.v7i2.2116>
- Hamid, M. A. et al. (2020). Kesiapan guru dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pembelajaran di era revolusi industri 4.0. *Jurnal Petik*, 6(1), 41–49. <https://doi.org/10.31980/jpetik.v6i1.687>





- Hidayat, T., & Sari, E. (2022). Implementasi Penguatan Profil Pelajar Pancasila dalam membangun karakter siswa di sekolah dasar. *Jurnal Basicedu*, 6(4), 5848–5858. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3120>
- Katz, J. (2013). The three block model of universal design for learning (UDL): Engaging students in inclusive education. *Canadian Journal of Education / Revue Canadienne de l'éducation*, 36(1), 153–194.
- Lestari, N. D. (2022). Analisis kendala guru dalam pengisian PDSS di era Kurikulum Merdeka. *Jurnal Pendidikan dan Teknologi*, 4(1), 45–58.
- Mulia, C. P. et al. (2023). The role of school culture in fostering inclusive education: A systematic literature review. *Sustainability*, 15(6), Article 5300. <https://doi.org/10.3390/su15065300>
- Mutmainnah, R. (2023). Pemberdayaan siswa disabilitas dalam ekstrakurikuler sekolah. *Jurnal Pendidikan Inklusif*, 9(2), 83–91.
- Prasetya, H. A. (2023). Sinkronisasi sistem Dapodik dan PDSS: Studi kasus pada sekolah negeri di Indonesia. *Jurnal Teknologi Pendidikan Modern*, 5(2), 73–86.
- Purwanto, A. et al. (2021). Education management research review: Challenges and opportunities for future research (Bibliometric studies). *International Journal of Social and Management Studies*, 2(4), 89–100. <https://doi.org/10.5555/ijosmas.v2i4.50>
- Rahmawati, Y., & Kwen, B. H. (2018). Indonesian curriculum reform in practice: Challenges of implementing the 2013 curriculum. *ECNU Review of Education*, 1(1), 1–17. <https://doi.org/10.30926/ecnuroe2018010101>
- Ramadhani, R. (2023). Inovasi teknologi dalam pendidikan inklusif untuk mendukung SDGs 2030. *Prosiding UNIPAR*.
- Retnawati, H. et al. (2018). Teachers' knowledge about higher-order thinking skills and its learning strategy. *Problems of Education in the 21st Century*, 76(2), 215–230. <https://doi.org/10.33225/pec/18.76.215>
- Setiawan, B., & Sulistiyo, U. (2021). Exploring teacher participation in technology-enhanced language learning professional development programs. *Studies in English Language and Education*, 8(1), 353–371. <https://doi.org/10.24815/siele.v8i1.18357>
- Suprayogi, U. et al. (2022). Implementasi pembelajaran berdiferensiasi untuk meningkatkan hasil belajar siswa sekolah dasar. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(4), 5799–5808. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i4.3275>
- Suryani, N. (2018). Pengembangan profesionalisme guru berkelanjutan berbasis teknologi informasi dan komunikasi di era digital. *Jurnal Kependidikan: Penelitian Inovasi Pembelajaran*, 2(2), 389–402. <https://doi.org/10.21831/jk.v2i2.20502>
- Wijaya, T. T. et al. (2019). Public trust in educational institutions: A systematic literature review. *Educational Sciences: Theory & Practice*, 19(4), 136–151. <https://doi.org/10.12738/estp.2019.4.009>
- Wiyono, B. B., & Hisyam, Z. (2022). The alignment of competency-based curriculum, instructional process, and assessment system in vocational high schools. *World Journal on Educational Technology: Current Issues*, 14(1), 221–234. <https://doi.org/10.18844/wjet.v14i1.6774>